

MEKANISME VALUASI NILAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA KHUSUS UNTUK MENJALANKAN MEKANISME PENILAIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN PASCA DIBENTUKNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2019 TENTANG EKONOMI KREATIF
INTISARI

Oleh:

Dimas Mahardhika Satriawan¹ dan Dina Widyaputri Kariodimedjo²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai metode penilaian hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan dan urgensi pembentukan lembaga penilai valuasi hak kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan tentang urgensi pembentukan lembaga khusus untuk menjalankan metode penilaian kekayaan intelektual sebagai objek jaminan.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis metode penelitian doktrinal atau normatif dengan mengkaji data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dilengkapi dengan hasil wawancara dengan narasumber yang memiliki keahlian dalam topik penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara analisis kualitatif dengan mengkategorikan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan cara berpikir analitik atau berpikir deduktif dalam mengambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pertama, metode atau mekanisme penilaian hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan di Indonesia dilaksanakan secara kasuistik dan berbeda dikarenakan belum ada standar khusus yang mengatur metode untuk menilai aset hak kekayaan intelektual dan hanya diatur secara umum dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, menjadi suatu urgensi untuk membentuk lembaga khusus yang menjalankan mekanisme penilaian hak kekayaan intelektual mengingat masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan skema pembiayaan kekayaan intelektual di Indonesia.

Kata kunci: metode penilaian hak kekayaan intelektual, objek jaminan, lembaga penilai.

¹ Mahasiswa Program Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

**MECHANISM FOR VALUATION OF THE VALUE OF INTELLECTUAL
PROPERTY AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
THE URGENCY OF ESTABLISHING A SPECIAL INSTITUTION TO
IMPLEMENT A MECHANISM FOR ASSESSING INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS AS A POST-GUARANTEE OBJECT
THE FORMATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24
2022 CONCERNING IMPLEMENTATION REGULATIONS
LAW NUMBER 24 OF 2019
ABOUT THE CREATIVE ECONOMY**

ABSTRACT

By:

Dimas Mahardhika Satriawan¹ and Dina Widyaputri Kariodimedjo²

This study aims to determine and examine the method for assessing intellectual property rights as collateral objects and the urgency of establishing an intellectual property rights valuation institution in Indonesia. This study explains the urgency of establishing a special institution to carry out the method for assessing intellectual property as collateral objects.

This research was conducted using doctrinal or normative research methods by reviewing secondary data including primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials supplemented by interview results with sources who have expertise in this research topic. The data obtained will be analyzed using qualitative analysis by categorizing the problems studied and the data collected. This research uses analytical thinking or deductive thinking in drawing conclusions.

Based on the results of this study, it can be concluded that first, the method or mechanism for assessing intellectual property rights as collateral objects in Indonesia is carried out in a case-by-case manner and differently because there is no specific standard that regulates the method for assessing intellectual property rights assets and is only regulated generally in laws and regulations. Second, it is urgent to form a special institution that carries out the intellectual property rights assessment mechanism considering that there are still obstacles in the implementation of the intellectual property financing scheme in Indonesia.

Keywords: *intellectual property assessment method, collateral object, assessment institution.*

¹ Master of Business Law and State Law Student, Faculty of Law, Gadjah Mada University.

² Thesis Supervisor, Faculty of Law, Gadjah Mada University.